



Analisis Laporan Ikhtisar Realisasi Anggaran Atas Pencapaian Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Periode 2020 - 2023

Rohmatul Virnanda Aprilliani^{1*}, Nur Ainiyah², Nurdiana Fitri Isnaini³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Majapahit, Indonesia

virnandaaprilliani@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Raya Jabon No.KM.0,7, Tambak Rejo, Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61364

Korespondensi penulis: virnandaaprilliani@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the increase and decrease in Original Regional Income at the One Stop Integrated Services Investment and Labor Service of Mojokerto City for the 2020 - 2023 period. The aim of this research is to find out how financial performance is measured by financial ratios. This type of research uses descriptive quantitative using secondary data in the form of budget realization reports for the One Stop Integrated Services Investment and Labor Service of Mojokerto City. This data analysis technique uses Financial Ratios. The results of the analysis show that there are fluctuations in performance which are influenced by various factors, including the COVID-19 pandemic which caused a decrease in investment and budget realization in 2020 and 2021. However, there was a recovery in 2022 with an increase in budget realization of up to 119%, reflecting the post-economic revival -pandemic. In 2023, the focus shifts to strengthening and sustaining economic recovery, with satisfactory performance results in several indicators, such as increasing the realized value of capital investment and the number of investors. However, there is a significant decline in the effectiveness ratio in 2023, indicating challenges in achieving budget targets. Overall, this research highlights the importance of adaptive strategies and strengthening institutional capacity to deal with changing economic dynamics, as well as the need for more effective policies to achieve long-term goals.

Keywords: Budget Realization Report, PAD Effectiveness Ratio, PAD Efficiency Ratio, Decentralization Degree Ratio, Revenue Budget Variance Analysis

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kenaikan dan penurunan pada Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Periode 2020 – 2023. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. Teknik analisis data ini menggunakan Rasio Keuangan. Hasil analisis menunjukkan adanya fluktuasi kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan investasi dan realisasi anggaran pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun demikian, terdapat pemulihan pada tahun 2022 dengan peningkatan realisasi anggaran hingga 119%, mencerminkan kebangkitan ekonomi pasca-pandemi. Pada tahun 2023, fokus bergeser pada penguatan dan keberlanjutan pemulihan ekonomi, dengan hasil kinerja yang cukup memuaskan di beberapa indikator, seperti peningkatan nilai realisasi penanaman modal dan jumlah investor. Namun, terdapat penurunan signifikan pada rasio efektivitas pada tahun 2023, yang menunjukkan tantangan dalam mencapai target anggaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya strategi yang adaptif dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah, serta kebutuhan akan kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Derajat Desentralisasi, Analisis Varian Anggaran Penadapatan

1. LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, Pemerintah Daerah di Indonesia telah memasuki fase baru dalam sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih luas dan bertanggung jawab secara proporsional. Pelaporan keuangan daerah menjadi semakin penting, terutama dengan adanya peraturan yang mengatur transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) Kota Mojokerto, sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik langsung, berperan dalam menyusun laporan keuangan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama periode pelaporan tahunan. Analisis kinerja keuangan menjadi alat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran anggaran. Penilaian ini dilakukan melalui rasio efektivitas dan efisiensi PAD serta analisis varian anggaran pendapatan dan rasio derajat desentralisasi. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemangku kepentingan.

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan DPMPTSP & NAKER Kota Mojokerto selama periode 2020-2023, dengan tujuan untuk mengukur kinerja keuangan melalui berbagai rasio dan analisis varian. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengukuran stabilitas anggaran melalui kontribusi PAD terhadap realisasinya, yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi instansi terkait, fakultas, dan penulis, serta memberikan kontribusi teoritis yang memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkaya wawasan dalam bidang akuntansi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto pada periode 2020-2023. Evaluasi ini mencakup analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, serta analisis varian anggaran pendapatan dan rasio derajat desentralisasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hasil analisis kinerja keuangan berdasarkan indikator-indikator tersebut, yang akan memberikan gambaran tentang

bagaimana efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Mojokerto selama periode penelitian.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi pembahasan mengenai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, serta teori-teori yang relevan seperti teori stewardship, agency theory. Teori Stewardship menekankan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan organisasi secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi, dan teori ini relevan dalam organisasi sektor publik seperti pemerintahan. Teori Keagenan, yang diperkenalkan oleh Jensen dan Mackling (1976), menggambarkan hubungan kontraktual antara principal (pemberi mandat) dan agent (yang diberi mandat), di mana agent bertindak atas nama principal. Dalam konteks organisasi sektor publik, teori ini menjelaskan pentingnya akuntabilitas pemerintah kepada rakyat melalui pelaporan keuangan. Pelaporan ini memungkinkan rakyat untuk menilai dan mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, mengatasi masalah asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Laporan keuangan daerah

Adalah dokumen penting yang disusun oleh pemerintah daerah untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran selama periode tertentu. Laporan ini mencakup berbagai elemen seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, menunjukkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Indikator kualitas laporan keuangan meliputi akurasi, konsistensi, relevansi, pengungkapan penuh, keterbacaan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, analisis rasio keuangan, kualitas sistem akuntansi, dan pengendalian internal yang efektif. Semua ini berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai pendekatan dalam mengukur kinerja keuangan, termasuk penggunaan rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, teori stewardship menekankan bahwa manajemen organisasi sektor publik bertindak untuk kepentingan lembaga, sementara agency theory menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang memberi dan menerima mandat, yang relevan dalam konteks akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan daerah, sebagai dokumen penting dalam evaluasi kinerja keuangan, mencakup berbagai elemen seperti neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi stabilitas, realisasi, efektivitas, dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk dampak pandemi COVID-19.

Anggaran

Adalah pernyataan estimasi kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial untuk periode tertentu, biasanya satu tahun. Penganggaran, yang merupakan proses penyusunan anggaran, sangat penting bagi organisasi sektor publik karena anggaran berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Proses penganggaran dimulai setelah perumusan strategi dan sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, karena anggaran yang tidak efektif dapat menggagalkan perencanaan yang telah dibuat.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menunjukkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan, khususnya melalui analisis indikator keuangan. Dalam konteks pemerintah daerah, kinerja keuangan mencerminkan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, mendukung pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, dengan meminimalisir ketergantungan pada pemerintah pusat. Pengukuran kinerja ini penting untuk memperbaiki kinerja, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan akuntabilitas publik, serta untuk menilai kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, dan kontribusi sumber pendapatan daerah selama periode tertentu.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) adalah indikator yang mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Dihitung sebagai perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran yang direncanakan, rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi pengelolaan sumber pendapatan. Rasio tinggi menunjukkan pengelolaan yang efektif dengan pendapatan melebihi target, sementara rasio rendah menunjukkan target tidak tercapai, mengindikasikan potensi masalah dalam

perencanaan atau eksekusi kebijakan pendapatan. Evaluasi rasio ini penting untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam strategi pengelolaan keuangan daerah.

Rumus rasio efektivitas menurut Mahsun dalam [1]. Analisis rasio ini di hitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan anggaran PAD. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik pula kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD. Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas makin tinggi bisa menunjukkan kemampuan daerah yang sangat baik Adapun berikut termasuk kinerja pengelolaan data keuangan daerah

Tabel 1 Kriteria Tingkat Efektivitas PAD

Presentase PAD	Tingkat Efektivitas
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
0 – 60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, No. 690.900.327, 1996

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) mengukur seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola dan mengumpulkan PAD dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dihitung sebagai perbandingan antara pendapatan yang dikumpulkan dan biaya operasional pengumpulan, rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya. Rasio tinggi mencerminkan pengumpulan pendapatan yang efisien dengan biaya rendah, sementara rasio rendah mengindikasikan inefisiensi dengan biaya pengumpulan yang mungkin terlalu tinggi. Evaluasi rasio ini penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki area yang memerlukan peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persen biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang didapat. Menurut [4]. Rasio ini dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Tingkat Efisiensi Belanja Daerah

Presentase Efisiensi PAD	Tingkat Efisiensi
>40%	Tidak Efisien
31% – 40%	Kurang Efisien
21% – 30%	Cukup Efisien
10% – 20%	Efisien
<10%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmud (2016:142)

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi mengukur sejauh mana wewenang dan tanggung jawab keuangan telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dihitung dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total anggaran keseluruhan, rasio ini menunjukkan tingkat otonomi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan terkait kebijakan lokal. Rasio tinggi mencerminkan desentralisasi yang lebih besar, dengan pemerintah daerah memiliki lebih banyak kontrol, sementara rasio rendah menunjukkan kendali yang masih dominan di tangan pemerintah pusat.

Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah [2]. Analisis ini biasanya di hitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan daerah dan total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Derajat Desentralisasi dapat di hitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Tingkat Desentralisasi

Skala interval derajat desentralisasi	Kemampuan keuangan Daerah
00,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Cukup
30,01 – 40,00%	Sedang
40,01 – 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Purba dan Hutabarat, 2017.

Analisis Varian Pendapatan

Analisis varian pendapatan mengevaluasi perbedaan antara pendapatan yang dianggarkan dan yang direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode. Dengan membandingkan angka ini, analisis ini mengidentifikasi penyebab selisih, baik lebih tinggi (varian positif) atau lebih rendah (varian negatif), dan mengungkap kekuatan serta kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan pendapatan. Hasilnya memberikan wawasan penting untuk meningkatkan efektivitas strategi pendapatan dan membantu penyesuaian dalam perencanaan keuangan masa depan. Evaluasi varian pendapatan juga membantu pemerintah daerah atau organisasi dalam merespons perubahan kondisi ekonomi, kebijakan, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan. Informasi tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan [3]. Analisis Varians Anggaran Pendapatan dapat di hitung sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varian Pendapatan} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto melalui data sekunder berupa laporan realisasi anggaran periode 2020-2023. Variabel yang diukur mencakup rasio efektivitas, efisiensi, derajat desentralisasi, dan varian anggaran pendapatan asli daerah (PAD). Analisis data dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Hasil analisis varian anggaran pendapatan mengkategorikan kinerja keuangan daerah berdasarkan kesesuaian antara realisasi dan anggaran yang direncanakan..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah realisasi anggaran periode 2020 – 2023 yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. Data realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sangat krusial untuk berbagai tujuan. Pertama, data ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dinas dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan, memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, publikasi realisasi anggaran meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dinas kepada masyarakat. Data ini juga berfungsi sebagai dasar perencanaan

dan penganggaran di masa depan, memungkinkan dinas untuk merencanakan dengan lebih baik dan mengalokasikan dana dengan tepat. Dalam konteks pengawasan, data realisasi anggaran membantu pihak berwenang dalam mengawasi penggunaan anggaran, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan kesesuaian dengan peraturan. Selain itu, data ini sangat penting untuk pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah dan masyarakat, serta untuk menilai dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun data realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Periode 2020 – 2023:

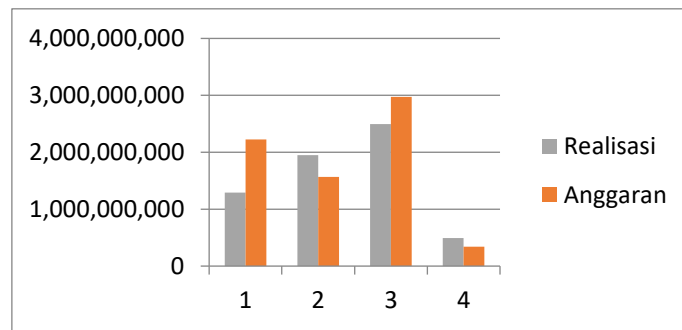
	Anggaran Pendapatan Asli Daerah		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	1.291.000.000	2.226.250.537,50	172%
2021	1.948.400.000	1.566.522.740	80%
2022	2.495.000.000	2.972.226.280	119%
2023	495.000.000	343.548.950	69%

Sumber: DPMPSTP & NAKER Kota Mojokerto.

Selama periode 2020 hingga 2023, kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto mengalami fluktuasi yang signifikan dalam pencapaian target pendapatan. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan pendapatan yang luar biasa mencapai 172% dari anggaran, didorong oleh kebijakan stimulus ekonomi terkait pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, pendapatan menurun tajam hingga hanya mencapai 80% dari anggaran, akibat dampak berkelanjutan dari pandemi dan ketidakpastian ekonomi. Tahun 2022 menunjukkan pemulihan dengan realisasi pendapatan sebesar 119% dari anggaran, berkat pelonggaran pembatasan dan kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi. Namun, pada tahun 2023, realisasi pendapatan kembali menurun menjadi 69% dari anggaran, dipengaruhi oleh perubahan prioritas anggaran, pengalihan pendapatan dari retribusi, dan tantangan dalam pelaksanaan program. Fluktuasi ini menggambarkan bagaimana berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, situasi darurat, dan dinamika ekonomi, mempengaruhi kinerja keuangan dinas secara signifikan.

Berdasarkan tabel diatas Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Periode 2020-2023 mengalami fluktuatif dalam Anggaran Pendapatan Asli Daerah disebabkan suatu kondisi adanya covid-19 pada tahun 2020 sehingga pada tahun tersebut berpengaruh dalam penurunan realisasi anggaran. Dengan adanya kondisi

tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto melakukan penyesuaian strategi dan program inovatif agar perubahan tersebut dapat meningkatkan suatu efektivitas dan efisien sehingga realisasi dan anggaran bisa mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan yang disebabkan karena tahun 2023 pendapatan yang berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan sudah tidak ada dan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



Grafik 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto periode 2020 – 2023

Hasil

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui presentase tingkat efektivitas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto periode 2020 – 2023 yang hasil presentasenya dapat disesuaikan kategori kriteria tingkat efektivitas pada tabel 4.2. Rekapitulasi Perhitungan berdasarkan rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi	Anggaran	Hasil	Tingkat Efektivitas
2020	2.226.250.537,50	1.291.000.000	172%	Sangat Efektif
2021	1.566.522.740	1.948.400.000	80%	Cukup Efektif
2022	2.972.226.280	2.495.000.000	119%	Sangat Efektif
2023	343.548.950	495.000.000	69%	Kurang Efektif

Sumber : data diolah peneliti

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran untuk menilai efektivitas pengelolaan dan pengumpulan PAD oleh pemerintah daerah, dengan membandingkan total PAD yang diperoleh dengan total biaya pengelolaannya. Rasio ini penting untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan dari sumber internal, seperti pajak dan retribusi. Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan pengelolaan sumber daya yang optimal, sementara rasio rendah mengindikasikan potensi inefisiensi atau pemborosan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan olah data diatas terkait pada rasio efesiensi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto periode 2020 -2023 yang hasil tingkat efisien pada tabel 4.5. Rekapitulasi perhitungan rasio efisien dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 -2023

Tahun	Biaya Pemerolehan	Realisasi PAD	Hasil	Hasil	Tingkat Efisiensi
2020	16.113.896.875,50	2.226.250.537,50	7,23813273	7%	Sangat Efisien
2021	21.394.055.176,32	1.566.522.740	13,65703455	14%	Efisien
2022	31.789.336.571	2.972.226.280	10,69546312	11%	Efisien
2023	22.866.820.130	343.548.950	66,56058803	7%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah Peneliti

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menggambarkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatannya yang diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). untuk menyelesaikan tugas rumus yang dapat digunakan pada pengukuran Derajat sentralisasi yaitu :

Berdasarkan olah data diatas terkait pada rasio Derajat Desentralisasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto periode 2020 -2023 dengan tingkat kategori yang dapat disesuaikan dengan tabel 4.7 rekapitulasi perhitungan berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Daerah	Hasil	Kemampuan Keuangan Daerah
2020	2.226.250.537,50	2.226.250.537,50	100%	Sangat Baik
2021	1.566.522.740	1.566.522.740	100%	Sangat Baik
2022	2.972.226.280	2.972.226.280	100%	Sangat Baik
2023	343.548.950	343.548.950	100%	Sangat Baik

Sumber : Data diolah peneliti

Analisis Varian Anggaran Pendapatan

Berdasarkan olah data diatas terkait pada Analisis Varian Anggaran Pendapatan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto periode 2020 - 2023. Rekapitulasi perhitungan Analisis Varian Anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Hasil Perhitungan Analisis Varian Anggaran

Tahun	Realisasi	Anggaran	Hasil	Kategori Analisis
2020	2.226.250.537,50	1.291.000.000	935.250.537,50	Baik
2021	1.566.522.740	1.948.400.000	-381.877.260,00	Kurang Baik
2022	2.972.226.280	2.495.000.000	477.226.280,00	Baik
2023	343.548.950	495.000.000	-151.451.050,00	Kurang Baik

Sumber : Data diolah peneliti.

Pembahasan

Pada tahun 2020 hingga 2023, kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto menunjukkan berbagai hasil yang bervariasi. Pada tahun 2020, meskipun indeks kepuasan masyarakat hampir mencapai target dan penurunan investasi disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, terdapat kebutuhan untuk perbaikan dalam penyelesaian izin tepat waktu. Tahun 2021 menunjukkan perbaikan dengan pencapaian target yang tinggi dalam jumlah investor, meskipun beberapa target lainnya tidak sepenuhnya tercapai. Pada 2022, pemulihan ekonomi terlihat dengan pencapaian yang baik dalam beberapa indikator, walaupun beberapa target investasi belum terpenuhi. Tahun 2023 menampilkan pencapaian signifikan, termasuk melampaui target dalam realisasi penanaman modal dan peningkatan jumlah investor, meskipun persentase penyerapan tenaga kerja sedikit di bawah target. Secara keseluruhan, Dinas ini menunjukkan kemajuan positif, dengan pencapaian yang konsisten dan perbaikan dalam kinerja keuangan dari tahun ke tahun.

Analisis kinerja keuangan dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dalam efektivitas, efisiensi, dan derajat desentralisasi anggaran. Rasio efektivitas bervariasi dari 172% (sangat efektif) pada 2020, menurun menjadi 69% (kurang efektif) pada 2023, akibat alihnya retribusi izin mendirikan bangunan ke Dinas Pekerjaan Umum. Rasio efisiensi juga berfluktuasi, dengan 8% (sangat efisien) pada 2020 dan 7% (sangat efisien) pada 2023, menunjukkan perubahan dalam pengelolaan biaya operasional dan investasi. Derajat desentralisasi tetap stabil pada 100%, mencerminkan pengelolaan keuangan yang sangat baik. Analisis varian anggaran pendapatan menunjukkan selisih positif pada 2020 dan 2022, menandakan kinerja baik, sementara selisih negatif pada 2021 dan 2023 menunjukkan pencapaian pendapatan yang kurang optimal. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam mencapai target pendapatan dan pengelolaan anggaran, dengan kebutuhan untuk penyesuaian strategi keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

Analisis kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Rasio efektivitas bervariasi dari 172% (sangat efektif) pada 2020 menjadi 69% (kurang efektif) pada 2023, dengan penurunan drastis akibat alih fungsi pendapatan. Rasio efisiensi, meskipun menunjukkan penurunan dari 8% (sangat efisien) pada 2020 menjadi 7% (sangat efisien) pada 2023, menandakan perubahan prioritas anggaran yang mempengaruhi operasional. Rasio derajat desentralisasi stabil di 100%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan. Analisis varian pendapatan mengungkapkan fluktuasi pencapaian target, dengan selisih positif pada 2020 dan 2022 menunjukkan kinerja baik, sedangkan selisih negatif pada 2021 dan 2023 mencerminkan tantangan dalam pengelolaan pendapatan. Fluktuasi ini memerlukan evaluasi mendalam untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas keuangan di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto periode 2020-2023 menunjukkan kemajuan signifikan meskipun terdapat beberapa tantangan. Pada tahun 2020, kinerja belum mencapai target, namun ada peningkatan pada tahun 2021 dan pemulihan ekonomi yang kuat pada 2022. Tahun 2023 menunjukkan hasil baik dalam investasi dan penyerapan tenaga kerja, namun NIB masih perlu perhatian. Kinerja keuangan menunjukkan variasi, dengan efektivitas dan efisiensi yang baik di beberapa tahun, tetapi

penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2023. Derajat desentralisasi tetap baik, menandakan otonomi fiskal yang kuat.

Saran

- a. Evaluasi dan perencanaan strategis berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki area yang lemah.
- b. Pemantauan dan evaluasi strategi keuangan harus dilakukan untuk memastikan stabilitas dan peningkatan kinerja di masa depan.
- c. Implementasikan program yang sesuai dengan target untuk mencapai stabilitas kinerja keuangan dan mengurangi fluktuasi dalam rasio efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Astria. (2015). Analisis laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pada kantor dinas pendapatan daerah kota bitung. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Berkas Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.
- Fitra, H. (2019). Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (Cakti Indra Gunawan (ed.); 1st ed.). IRDH Book Publisher.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:STIE YKPN.
- Purba, S. dan R.C. Hutabarat. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi. Jurnal Ilmiah Kohesi 1 (1) : 228-240.